

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN DI DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN DANDER KABUPATEN BOJONEGORO

Nilamaya Puspita Dewi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: nilamaya96@gmail.com

Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: tjitjikrahaju@unesa.ac.id

Abstrak

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah berjalan sejak tahun 2015 dan berwujud sebagai bantuan dana pendidikan kepada siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat di Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini Pemerintah Desa Sumberagung ikut andil dan terlibat secara langsung pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung mulai dari tahap pengajuan usulan penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung, tahap pengajuan pencairan dana sampai penyaluran dana sesuai jenjang kelas dan profesi orang tua serta pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa terhadap penggunaan dana DAK Bidang Pendidikan yang didapat melalui transfer dana dari RKUD ke Rekening Kas Desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara umum Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini menggunakan teori menurut Sutrisno yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan komunikasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro ini belum sepenuhnya efektif. Pada indikator pemahaman program yang didapat oleh sasaran penerima dan Pemerintah Desa sudah cukup jelas dan baik. Dari indikator tepat sasaran ini penerima DAK sudah sesuai dengan pedoman yaitu siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat, walaupun terjadi kekeliruan data saat pendataan dan sudah dikendalikan dengan usulan revisi ulang. Sedangkan untuk indikator tepat waktu belum sepenuhnya tepat waktu karena terjadi keterlambatan penyaluran dana kepada penerima, terutama bagi kelas XII yang baru mendapatkan dana ketika sudah lulus sekolah. Selain itu indikator tercapainya tujuan program juga masih belum berjalan maksimal karena adanya penyalahgunaan dana dari penerima DAK kelas XII, masih banyaknya anak putus sekolah sebanyak 87 anak dan rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA Sederajat sebanyak 23,94%. Pada indikator perubahan nyata dari program ini hanya berpengaruh besar pada orang tua dengan keterbatasan ekonomi rendah karena kondisi pendidikan anak bergantung pada bantuan DAK Bidang Pendidikan.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, DAK Pendidikan.

Abstract

Special Allocation fund management (DAK) Education is the Government's policy has been running the Bojonegoro Regency since the year 2015 and intangibles to help fund education to students SMA/SMK/MA Equivalent in Bojonegoro. In this case the Government of the village of Sumberagung participate and engage in direct management of DAK Education in Sumberagung Village starting from the stage of the filing of the proposed recipients of DAK Education in the village of Sumberagung, the stage of submission of disbursement to channeling funds according level of class and profession of the parents as well as the accountability of the Government of the village of DAK funds against the use of Education acquired through the transfer of funds from a cash account RKUD village. The purpose of this study was to describe in general the effectiveness of the Special Allocation fund management (DAK) Education in Sumberagung Village Region Dander Subdistrict Bojonegoro. The focus of this research uses theories according to the understanding of the program, namely Sutrisno is right on target, on time, the achievement of business goals, and real change. This type of research is descriptive qualitative approach. The technique of data collection in this study i.e., observation, interviews, and communication. While the analysis techniques used for data reduction, namely the presentation of data and the withdrawal of the conclusion. The results of the research the effectiveness of the Special Allocation fund management (DAK) Education

in Sumberagung Village Region Dander sub-district Bojonegoro is not yet fully effective. The indicator on the understanding of the program obtained by the target recipients and the Government the village had enough clear and good. From the indicators right on target this receiver DAK is in compliance with the guidelines, namely the students of SMA/SMK/MA-equivalents, although the failure data while logging and controlled with the proposed revisions. As for the indicators in a timely manner not fully on time due to the delay in the distribution of funds to the recipients, particularly for class XII which get new funds when it's graduate school. In addition the indicators of achievement goals of the program are also still not running at maximum because of the misuse of funds from recipients of DAK class XII, still large number of children dropping out of school as much as 87 children and low Participation numbers are Rough (APK) at the level of SMA/SMK/MA Equal as much as 23.94%. On indicators of real change from the program just large influential in the elderly with low economic limitations due to the condition of education relies on the help of DAK education.

Keywords: Effectiveness, Management, DAK Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam kemajuan bangsa kedepannya. Dengan adanya pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, namun menciptakan kualitas SDM tersebut tidaklah mudah. Hal itu terbukti dari banyaknya anak putus sekolah di Indonesia yang disebabkan dari faktor keterbatasan ekonomi orang tua dalam menyekolahkan anaknya atau bahkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan lebih memilih untuk bekerja mencari uang daripada harus melanjutkan bangku pendidikan.

Adanya anak putus sekolah yang masih banyak di Indonesia ini sangat memprihatinkan serta memerlukan perhatian lebih dari Pemerintah melalui serangkaian program ataupun upaya dalam memajukan dunia pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2 yang berisi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, sedangkan pada Ayat 4 menjelaskan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Walaupun upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi persoalan anak putus sekolah melalui program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan wujud sebagai pemberian bantuan dana agar dapat terus melanjutkan pendidikannya ini tidaklah berdampak maksimal, karena masih saja terdapat anak putus sekolah di beberapa daerah di Indonesia seperti Kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan lumbung pangan negeri dan potensi alamnya terutama penghasil minyak dan gas bumi. Namun pada kenyataannya Kabupaten Bojonegoro masih ditemui anak putus sekolah yang masih banyak pada tahun 2015. Hal itu terbukti dari

informasi yang dilansir dari media *online* (<https://www.kanalbojonegoro.com>) menyebutkan jumlah anak putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 667 anak, 1.103 ditingkat Sekolah Menengah Pertama dan 2.221 anak pada jenjang SMA. Sedangkan berdasarkan jumlah per-Kecamatan tertinggi di Kecamatan Ngraho 439 anak, disusul Kecamatan Ngasem 353 anak, Dander 383 anak dan Sukosewu 215 anak.

Dari banyaknya jumlah anak putus sekolah tertinggi pada jenjang SMA sebanyak 2.221 anak tersebut mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk memberikan upaya dalam mengatasinya sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar yang mengharuskan setiap daerah meningkatkan program wajib belajar 9 tahun menjadi 12 tahun, yakni sampai ke jenjang pendidikan menengah atas. Upaya tersebut berupa slogan Gerakan Ayo Sekolah untuk menggugah semangat pelajar dalam menempuh dunia pendidikan dan diimbangi dengan pemberian dana pendidikan bagi siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat yang didapat dari adanya pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap dengan adanya pengelolaan DAK Bidang Pendidikan yang berwujud sebagai pemberian dana pendidikan dan sudah berjalan sejak tahun 2015 ini dapat membantu orang tua dalam membiayai sekolah anaknya sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat yang mengeluhkan tentang persoalan biaya pendidikan anak dana anak putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA Sederajat dapat diminimalisir dengan baik.

Pemberian DAK Bidang tersebut diberikan tiap tahun. Sedangkan kegunaan DAK Pendidikan ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan sekolah misalnya membayar SPP, membeli buku sekolah, membeli seragam sekolah dll. Adapun besaran dana yang diperuntukkan bagi siswa-siswi tingkat SMA/SMK/MA Sederajat pada tahun 2015 yang dilansir oleh www.bojonegorokab.go.id sebagai berikut :

“Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan tahun 2015, yang baru saja diberikan bagi anak sekolah di Tingkat SMA/SMK/MA sederajat sebesar Rp.500.000,- bagi anak kelas X dan XI serta Rp.250.000,- bagi anak kelas XII di seluruh Kabupaten Bojonegoro tanpa melihat status orang tua, telah meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah tidak main-main tentang keberlanjutan generasi penerus bangsa ini.”

Pada tahun 2016 besaran dana DAK Bidang Pendidikan yang diberikan kepada siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat tersebut berubah sebagaimana Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp.2.000.000,- bagi setiap siswa/siswi kelas X dan XI serta Rp.1.000.000 bagi kelas XII. Sedangkan pada tahun 2017 besaran dana tersebut telah mengalami peningkatan sebagaimana Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro yaitu besaran dana yang diberikan kepada penerima DAK berdasarkan atas penggolongan dana sesuai kondisi ekonomi orang tua atau golongan profesi dan jenjang kelas anak. Peningkatan besaran ini terlihat pada setiap siswa/siswi kelas X dan XI dari golongan orang tuanya miskin yang mendapatkan dana sebesar Rp.2.100.000,-.

Pencairan DAK Bidang Pendidikan tahun 2017 dilakukan melalui 2 tahapan. Seperti yang dilansir oleh www.bojonegorokab.go.id menyebutkan :

“Sesuai Surat Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017, pada rekening Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Desa dan Kelurahan sebesar Rp50 miliar. Pencairan sejumlah itu merupakan tahap pertama. Jumlah total anggaran DAK Pendidikan senilai Rp102 miliar yang diperuntukkan bagi 50.305 pelajar SMA Sederajat dengan pencairan dilakukan dua tahap.”

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan ini juga melibatkan Pemerintah Desa dan LKM di Kelurahan dalam melakukan pengelolaan di wilayah masing-masing. Seperti halnya pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung yang dilakukan Pemerintah Desa mulai dari tahap pengajuan usulan penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung, pengajuan pencairan dana setelah ditetapkannya pagu anggaran oleh Bupati, penyaluran dana kepada penerima bantuan serta

pertanggungjawaban yang harus dilakukan Pemerintah Desa terhadap penggunaan anggaran DAK Bidang pendidikan yang diperoleh melalui transferan dana dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa.

Adapun mekanisme dari pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung tersebut sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan mulai dari adanya kekeliruan saat pendataan penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung, terlambatnya penyaluran dana kepada penerima DAK, terutama bagi kelas XII yang baru mendapatkan dana setelah lulus sekolah sehingga mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan uang yang tidak semestinya serta banyaknya anak putus sekolah pada tahun 2017 sebanyak 87 anak, bahkan dengan jumlah tersebut Desa Sumberagung menjadi desa tertinggi yang memiliki jumlah anak putus sekolah terbanyak se-kecamatan Dander.

Peneliti sangat tertarik untuk mengetahui efektivitas dari adanya pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan sebagai wujud pemberian dana pendidikan jenjang SMA/SMK/MA Sederajat untuk mengatasi persoalan banyaknya anak putus sekolah yang terjadi di Bojonegoro terutama di Desa Sumberagung yang memiliki anak putus sekolah tertinggi di Kecamatan Dander dengan jumlah 87 anak melihat kondisi jarak Kecamatan Dander yang tidak begitu jauh ± 12 Km dari pusat kota Bojonegoro. Dan peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.”**

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif ini untuk mengungkapkan hasil penelitian dengan menekankan pada gambaran objektif tentang keadaan yang sebenarnya pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2012:8). Sedangkan pendekatan kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah.

Fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan ukuran efektivitas menurut Sutrisno (2007:125-126) yang

meliputi Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, dan Perubahan Nyata.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan komunikasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2012:246-252) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang dianalisis menggunakan ukuran efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126) sebagai berikut :

1. Pemahaman Program

Pemahaman penerima DAK Bidang Pendidikan terhadap pelaksanaan program setidaknya didapat dari Pemerintah Desa Sumberagung dalam memberikan sosialisasi sebelum dimulainya pelaksanaan penyaluran dana kepada penerima DAK Bidang Pendidikan di Balai Desa Sumberagung. Sosialisasi tersebut berupa informasi mengenai kegunaan dana DAK Bidang Pendidikan sebagai pembiayaan kebutuhan sekolah dan mekanisme perbedaan pengambilan dana antara penerima DAK Bidang Pendidikan kelas X dan XI yang diambil di PD. BPR Kabupaten Bojonegoro ataupun dikoordinir secara langsung oleh masing-masing sekolah serta dana yang diberikan secara langsung oleh Pemerintah Desa Sumberagung bagi penerima kelas XII.

Sedangkan pemahaman Pemerintah Desa Sumberagung didapat dari sosialisasi yang diadakan oleh Bagian Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro bersama OPD terkait yang terlibat dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro dan didampingi oleh Camat Dander beserta Kasi Pemerintahan Kecamatan. Sosialisasi tersebut sudah dilakukan selama 3 kali setiap adanya perubahan aturan terkait pedoman pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Pendopo Kecamatan Dander, sehingga informasi yang didapat Pemerintah Desa dan Kecamatan mengenai pengelolaan DAK Bidang Pendidikan sudah cukup jelas.

2. Tepat Sasaran

Penetapan sasaran penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung dilakukan melalui pendataan dari RT setiap Dusun setempat yaitu Dusun Parengan, Dusun Glonggong, Dusun Kebonagung, dan Dusun Plosorejo. Dari pendataan tersebut ditemui permasalahan yaitu

kekeliruan data yang diantaranya salah kelas, belum terdata dan bahkan ada anak yang dropout tetapi masih terdata dalam penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung.

Permasalahan ini dapat dikendalikan melalui pengajuan revisi ulang nama-nama siswa yang belum terdata serta siswa yang terjadi kekeliruan kelas dengan mencantumkan ke dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana atas pencairan tahap 1 (satu) sehingga menjadikan program ini tepat sasaran sesuai dengan persyaratan dalam pedoman pengelolaan DAK Bidang Pendidikan yaitu Siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat.

Sedangkan besaran dana yang disalurkan oleh Pemerintah Desa Sumberagung kepada penerima DAK Bidang Pendidikan tersebut ada ketidaksesuaian dengan aturan karena adanya penurunan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di pertengahan tahun 2017 serta pemotongan atas lebih bayar DBH berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2017 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Triwulan Satu pada tahun anggaran 2017 sehingga berdampak pada pemotongan setiap anggaran dalam APBD, termasuk juga pagu anggaran DAK Bidang Pendidikan yang diperoleh Pemerintah Desa Sumberagung dan pengurangan dana yang disalurkan kepada penerima DAK Bidang Pendidikan. Penyaluran dana tersebut dilakukan dengan berpatokan pada pagu anggaran yang didapat oleh setiap desa.

3. Tepat Waktu

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung ini dilakukan setiap tahun oleh Pemerintah Desa Sumberagung. Mekanisme dari pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mulai dari tahap dari tahap pengusulan penerima DAK Bidang Pendidikan, pengajuan pencairan dana setelah ditetapkannya pagu anggaran oleh Bupati, penyaluran dana kepada penerima bantuan serta pertanggungjawaban dari Pemerintah Desa terhadap penggunaan DAK Bidang Pendidikan yang didapat dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan ditransfer ke rekening Kas Desa belum sepenuhnya tepat waktu.

Pengajuan usulan penerima DAK Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sumberagung sudah tepat waktu yaitu pada pertengahan bulan Januari 2017, sedangkan untuk pengajuan pencairan dana diajukan tidak lebih dari 3 minggu setelah dikeluarkannya pagu anggaran oleh Bupati. Pengajuan ini dilakukan melalui 2 tahapan, pengajuan tahap 1 (satu) pada tanggal 5 Mei 2017 dan tahap 2 tanggal 7 Desember 2017. Walaupun Pemerintah Desa Sumberagung sudah

tepat waktu dalam melakukan pengajuan pencairan DAK Bidang Pendidikan. Namun beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro masih ada yang terlambat dalam mengajukan proposal pencairan.

Adanya keterlambatan pengajuan pencairan dana yang dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro tersebut berimbas pada terhambatnya pencairan dana dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga penyaluran dana yang disalurkan kepada penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung juga ikut mengalami keterlambatan, dimana siswa kelas XII baru mendapatkan dana tersebut ketika sudah lulus sekolah. Penyaluran dana tahap 1 (satu) dilakukan pada tanggal 8 Juni 2017 setelah selang waktu 5 hari menerima tranferan dana dari RKUD, sedangkan penyaluran tahap 2 (dua) bagi kelas X dan XI dilakukan pertengahan bulan Januari 2018.

Setelah menyalurkan dana kepada penerima DAK Bidang Pendidikan, Pemerintah Desa Sumberagung melakukan pertanggungjawaban melalui pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan DAK Bidang Pendidikan yang dibuat 2 kali sebagaimana penyaluran dana dilakukan 2 tahapan. LPJ atas penyaluran dana tahap 1 (satu) diserahkan pada tanggal 28 Agustus 2017.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung adalah meminimalisir anak putus sekolah, meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan membiayai kebutuhan sekolah. Ketiga tujuan tersebut belum berjalan maksimal karena masih terdapat permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan.

Anak putus sekolah di Desa Sumberagung pada tahun 2017 sebanyak 87 anak dan menjadi desa tertinggi yang memiliki jumlah anak putus sekolah terbanyak dari total se-Kecamatan Dander sebanyak 322 anak. Tujuan meminimalisir anak putus sekolah ini belum berjalan maksimal kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk bekerja dan tergiur dengan gaji/honor yang mereka dapatkan bila dibandingkan dengan besaran dana DAK Bidang Pendidikan, sehingga perlu adanya serangkaian kegiatan seperti sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya dunia pendidikan terutama dalam wajib belajar 12 tahun yang digelar oleh Pemerintah Desa bersama Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan, PKK dan lainnya.

Jumlah APK pada jenjang SMA/SMK/MA Sederajat di Desa Sumberagung tahun 2017 sebanyak 23,94%. Jumlah tersebut terbilang sedikit sehingga Pemerintah Desa perlu berkerjasama dengan Dinas Pendidikan maupun instansi terkait untuk mencari solusi dalam memecahkan persoalan ini.

Kegunaan DAK pendidikan tersebut sebagai pembiayaan sekolah seperti SPP, membeli buku sekolah dll. Namun dalam penggunaan dana tersebut telah disalahgunakan oleh beberapa penerima DAK kelas XII di Desa Sumberagung untuk membeli hp dan kebutuhan lainnya. Penyebab adanya penyalahgunaan ini karena mereka baru mendapatkan dana secara langsung setelah lulus sekolah.

5. Perubahan Nyata

Perubahan Nyata dari pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung ini sangat terlihat dari beberapa orang tua yang memiliki keterbatasan ekonomi rendah, karena selain terbantu dalam pembiayaan sekolah anak, pendidikan anak juga menjadi lebih terjamin hingga tamat pendidikan menengah atas. Namun perubahan tersebut tidak dirasakan oleh sebagian orang tua lainnya karena ada atau tidaknya bantuan tersebut pendidikan anak tetap menjadi hal terpenting dalam menentukan masa depan, selain itu dalam kondisi ekonomi yang terbatas sekalipun mereka berusaha mencari pinjaman terlebih dahulu demi pendidikan anaknya dan dibayar ketika sudah menerima pencairan DAK Bidang Pendidikan. Sehingga perubahan nyata dari program ini yang memberikan pengaruh besar dalam dunia pendidikan hanya dirasakan oleh orang tua dengan keterbatasan ekonomi rendah karena kondisi pendidikan anak bergantung pada bantuan DAK Bidang Pendidikan tersebut.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yang dilihat dengan menggunakan 5 (lima) indikator pengukuran efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126) ini belum sepenuhnya efektif karena adanya permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung.

Pada indikator pemahaman program yang didapat oleh sasaran penerima ataupun Pemerintah Desa sudah baik, dimana pemahaman sasaran program setidaknya diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa sebelum pelaksanaan penyaluran dana, sedangkan pemahaman Pemerintah Desa diperoleh dari sosialisasi yang diadakan Bagian Pemerintahan beserta OPD terkait. Dari indikator tepat sasaran ini penerima DAK sudah sesuai dengan pedoman yaitu siswa-siswi SMA/SMK/MA Sederajat, walaupun terjadi kekeliruan data saat pendataan dan sudah dikendalikan dengan usulan revisi ulang.

Sedangkan dari indikator tepat waktu dimulainya kegiatan pengelolaan mulai dari tahap dari tahap pengusulan penerima DAK Bidang Pendidikan, pengajuan pencairan dana, penyaluran dana kepada penerima bantuan serta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa terhadap penggunaan DAK Bidang Pendidikan yang didapat dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan ditransfer ke rekening Kas Desa belum sepenuhnya tepat waktu. Hal itu dibuktikan dari adanya keterlambatan penyaluran dana kepada penerima DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung terutama bagi siswa kelas XII yang baru mendapatkan dana ketika sudah lulus sekolah. Penyebab keterlambatan itu berasal dari beberapa desa di Kabupaten Bojonegoro yang terlambat dalam mengajukan proposal pencairan dana, sehingga memperlambat pelaksanaan pencairan dana yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Sementara untuk indikator tercapainya tujuan pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung ini belum berjalan maksimal karena masih ditemui permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian tujuan seperti adanya penyalahgunaan dana dari penerima DAK kelas XII yang penyebabnya berasal dari keterlambatan penyaluran dana, dimana mereka baru mendapatkan dana ketika sudah lulus sekolah. Selain itu juga dari pihak desa sendiri tidak melakukan upaya atau tindakan dalam melakukan pemantauan kepada penerima DAK Bidang Pendidikan terhadap penggunaan dana setelah disalurkan. Permasalahan kedua yaitu adanya anak putus sekolah pada tahun 2017 yang masih terbilang banyak yaitu 87 anak dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SMA/SMK/MA Sederajat di Desa Sumberagung juga masih terbilang rendah yaitu 23,94%. Pada indikator perubahan nyata dari program ini hanya berpengaruh besar pada orang tua dengan keterbatasan ekonomi rendah karena kondisi pendidikan anak bergantung pada bantuan DAK Bidang Pendidikan.

Saran

Berdasarkan uraian dari hasil kesimpulan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran terkait Efektivitas Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan di Desa Sumberagung yaitu :

1. Pihak RT seharusnya lebih teliti dan memberikan informasi terlebih dahulu terkait persyaratan yang dimintai saat pendataan untuk menghindari kekeliruan.
2. Bupati Bojonegoro seharusnya lebih tegas lagi dalam memberikan teguran bagi Pemerintah Desa ataupun LKM di Kabupaten Bojonegoro yang tidak tepat waktu melakukan pengajuan pencairan DAK Bidang Pendidikan

3. Pemerintah Desa Sumberagung seharusnya melakukan pemantauan kepada penerima DAK Bidang Pendidikan terhadap penggunaan dana DAK Bidang Pendidikan setelah disalurkan agar terhindar dari penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan kegunaan semestinya sebagai pembiayaan kebutuhan sekolah.

4. Pemerintah Desa Sumberagung seharusnya memberikan serangkaian kegiatan seperti sosialisasi ataupun penyuluhan bersama Karang Taruna, dan PKK kepada masyarakat terhadap pentingnya dunia pendidikan terutama dalam wajib belajar 12 tahun.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pembimbing Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si, kedua penguji yaitu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si dan Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP, Pemerintah Desa Sumberagung dan pihak Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro serta OPD terkait seperti Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dinas Komunikasi dan Informatika. 2015. *Launching Ayo Sekolah Bagi Anak Bojonegoro*. <http://www.bojonegorokab.go.id/berita/baca/390/Launching-Ayo-Sekolah-Bagi-Anak-Bojonegoro> (diakses pada tanggal 27 April 2017)
- HN, Chandra. 2015. *Bojonegoro Terima Dana Alokasi Khusus Rp 19,04 Miliar*. <https://jatim.antaranews.com/berita/154380/bojonegoro-terima-dana-alokasi-khusus-rp19046-miliar> (diakses pada tanggal 15 Oktober 2017)
- Humas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 2015. *Launching Gerakan Ayo Sekolah, Disdik Umumkan Jumlah*. APS. <https://www.kanalbojonegoro.com/launching-gerakan-ayo-sekolah-disdik-umumkan-jumlah-aps/> (diakses pada tanggal 27 April 2017)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sekretariat Jenderal, Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK). 2016. *Ikhtisar Data Pendidikan Tahun 2015/2016*. http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_7_8103EAF-0C22-4306-9451-4FD5E77FBA67_.pdf (diakses pada tanggal 14 Oktober 2017)
- Made Artana, Iyus Akhmad Haris, Gede Andreyan Semara Bhawa. 2014. *Efektivitas Pengelolaan Dana*

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kecamatan Sukasada.* Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Volume 4 Nomor 1 Tahun 2014
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. (online)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (online)
- Sugiyono. 2012. *Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta
- Sulastri, Nova. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.* Skripsi. Kendari: Universitas Halu Oleo
- Sutrisno, Edy. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Kencana
- Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-undang Republik Indonesia Pasal 31 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan. (online)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (online)
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik.* Malang: Bayumedia Publishing
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Media Pressindo